

LKjIP 2018



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2018.

Laporan Kinerja (LKj) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa RENSTRA Tahun 2013.-2018 LKj Tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2013-2018).

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Komitmen dalam penyusunan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone pada tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 8 indikator kinerja utama, terdapat 5 indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan.

Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih

Watampone, 02 Februari 2019

Pt. KEPALA BPBD KAB. BONE



H. A. SURYA DARMA, SE. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19600424 198702 1 004

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	12
1.5 Inovasi Pelayanan Publik.....	12
1.6 Sistematisasi Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1 Rencana Strategis.....	20
Visi dan Misi	21
Tujuan dan Indikator Kinerja	22
Sasaran dan Indikator Kinerja	23
Program untuk Pencapaian Sasaran.....	24
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	25
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	26
2.4 Realisasi Anggaran Tahun 2018.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama 2018.....	33
Perbandingan Capaian Kinerja	
- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini	
Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan	
Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	
- Analisis serta efisiensi penggunaan sumber daya	
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan	
Pencapaian pernyataan kinerja	
Realisasi Anggaran	43
BAB IV PENUTUP	45
LAMPIRAN.....	46

Daftar Tabel

1.1 Jumlah Pegawai BPBD	9
1.2 Data Pegawai BPB Berdasarkan Tingkat Golongan.....	10
1.3 Data Pegawai yang telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural	11
1.4 Data Pegawai BPBD berdasarkan Eselon.....	11
2.1 Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPBD	22
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.....	24
2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018.....	24
2.4 Perjanjian Kinerja BPBD Tahun 2018.....	25
2.5 IKU BPBD	26
2.6 Perjanjian Kinerja	27
2.7 Rencana Belanja BPBDT.A 2018.....	27
2.8 Alokasi Per Sasaran Tahun Anggaran 2018	28
3.1 Skala Ukuran Optimal.....	32
3.2 Pencapaian Indikator Sasaran	32
3.3 Presentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	33
3.5 Perbandingan Capaian Kinerja	34
3.56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	37
3.7 Program dan Kegiatan.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkandan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012 – 2032;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Umsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja BPBD. Tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone yaitu sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Menetapkan pedoman dan pengarah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan

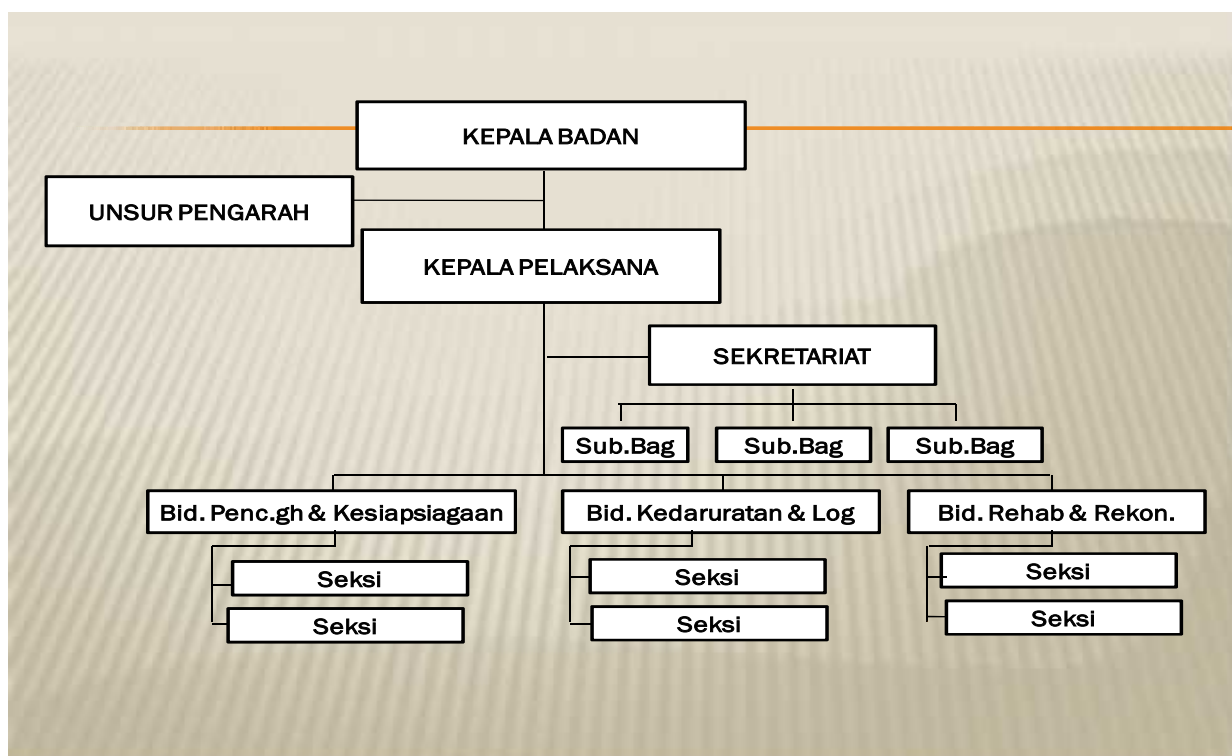
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN, APBD dan sumber dana lainnya
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bonemempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Melaksanakan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana daerah sesuai petunjuk dan arahan Bupati Bone

c. Struktur Organisasi



Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone

adalah Unsur Pengarah dan Unsur pelaksana

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai Fungsi Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur pengarah

Unsur pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. Memantau dan;
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

2. Unsur pelaksana

Unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi;
 - b. Komando;
 - c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada BPBD Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 28 tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Badan, Unsur Pengarah, Unsur Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone maka untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, unsur pelaksana mempunyai tugas secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan rincian sbb :

1) Kepala Badan

Mempunyai tugas pokok menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional terhadap usaha Penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Kepala Badan Mempunyai Tugas :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan Efisien
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang – undangan
- d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana
- e. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana
- f. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada wilayahnya.
- g. Melaporkan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- h. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang
- i. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

- j. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2) Unsur Pengarah

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam Penanggulangan Bencana. Untuk melaksanakan tugas, unsur Pengarah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
- b. Memantau dan
- c. Mengevaluasi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

3) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan Penanggulangan Bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana saat tanggap darurat dan pascabencana.

Untuk melaksanakan tugas, unsur pelaksana mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana
- b. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
- c. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

4) Sekretaris

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai Fungsi :

- a. Pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi dilingkungan BPBD
- b. Menyusun perencanaan dan perumusan kebijakan teknis BPBD
- c. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan Peraturan perundang – undangan, organisasi, tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga BPBD
- d. Pembinaan dan Pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol di lingkungan BPBD
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah BPBD
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) Sub.bagian :

- a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub.Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
- c. Sub. Bagian Program

5) Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pencegahan dan

Kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
 - c. Pelaksanaan Hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
 - d. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat
 - e. Melaksanakan Tugas – tugas lain yang diberikan pimpinan.
- ◆ Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari 2 (Dua) seksi :
- a. Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - b. Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

6) **Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta dukungan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. Penyusunan perencanaan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - f. Melaksanakan tugas – Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ◆ Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari 2 (Dua) Seksi :
- a. Seksi Tanggap Darurat
 - b. Seksi Perbaikan dan bantuan darurat.

7) **Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan umum di bidang Penanggulangan Bencana pada pascabencana.
 - b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana
 - c. Penyusunan Perencanaan di bidang Penanggulangan Bencana Pascabencana.
 - d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana.
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- ◆ Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari 2 (Dua) seksi:
- a. Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
 - b. Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone, maka struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone, terdiri dari 1(satu) Kepala Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIa (secara ex-officio), 1(satu) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana setingkat eselon IIb, 1(satu) Sekretaris, 3(tiga) Kepala Bidang setingkat eselon IIIb dan 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian/Seksi setingkat eselon IVa.

Secara terperinci diuraikan sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

- └ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- └ Sub Bagian Keuangan
- └ Sub Bagian Program.

2. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:

- └ Seksi Pengurangan Resiko Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat.
- └ Seksi Kesiapsiagaan dan Pencegahan

3. Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari :

- └ Seksi Tanggap Darurat
- └ Seksi Perbaikan dan Bantuan Darurat

4. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari:

- └ Seksi Penilaian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan Fisik
- └ Seksi Pemulihan, Peningkatan Sosial Ekonomi dan Penanganan Pengungsi

Berdasarkan pada Eselonisasi, maka Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bone, terdiri dari :

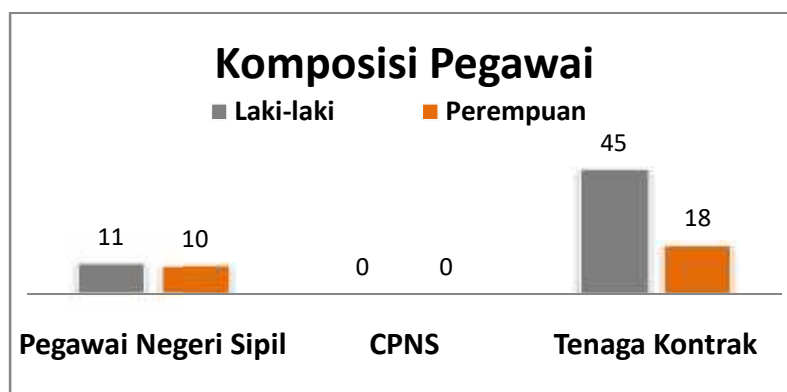
1. Kepala Badan (Eselon IIA) 1 orang
2. Kepala Pelaksana Badan (Eselon IIB) 1 orang.
3. Sekretaris (Eselon IIB) 1 orang
4. Kepala Bidang (Eselon IIB) 3 orang
5. Tim Pengarah (Non Eselon)
6. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi (Eselon IVA) 9 (sembilan) orang.
7. Staf sebanyak sesuai kebutuhan.

Susunan kepegawaian dan jumlah personil Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten Bone berdasarkan tingkat Pendidikan pada Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1.
Jumlah PNS dan Tenaga Kontrak BPBD Kabupaten Bone
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2018

No	Pendidikan	Status Kegawaian		
		CPNS	PNS	Jumlah
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	-	-	-
3.	SMA/SEDERAJAT	-	5	5
4.	D3	-	1	1
5.	S1	-	7	7
6.	S2	-	8	8
Jumlah			21	21



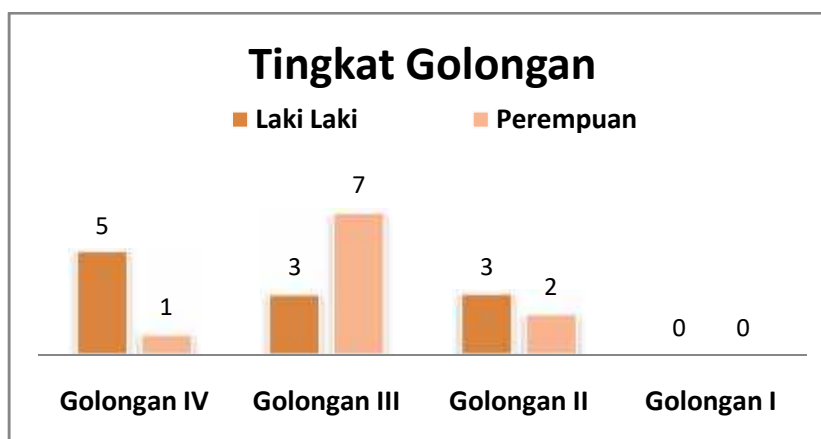
Dilihat dari tabel berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas, Pegawai BPBD

Kabupaten Bone sangat menunjang di dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya di dalam menentukan tugas-tugas kebencanaan dan mensinergikan program/kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan tingkat Pendidikan sebagaimana diatas.

Jumlah Pegawai BPBD Kabupaten berdasarkan pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.2.
Pegawai BPBD Kabupaten Bone
Berdasarkan Tingkat Golongan
Tahun 2018

No.	Golongan	Status Kepegawaian		Jumlah
		CPNS	PNS	
1.	Gol. I	-	-	-
2.	Gol. II	-	5	5
3.	Gol. III	-	10	10
4.	Gol. IV	-	6	6
Jumlah		-	21	21

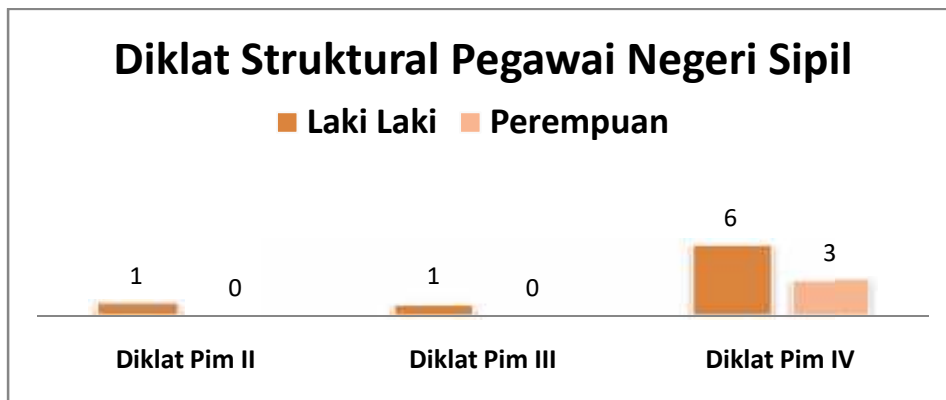


Berdasarkan Tabel 1.2 pegawai BPBD Kabupaten Bone berdasarkan golongan terdiri atas, Golongan II sebanyak 20 %, Golongan III sebanyak 60%, dan Golongan IV sebanyak 55 % melihat komposisi tersebut, pegawai BPBD Kabupaten Bone banyak ditempati oleh golongan II, III, dan IV dilain sisi BPBD memerlukan tambahan pegawai Golongan II dan III untuk tenaga administrasi dan tenaga konseptor dalam hal ini Jabatan Fungsional Umum (JFU).

Disamping pendidikan dan latihan Struktural, data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

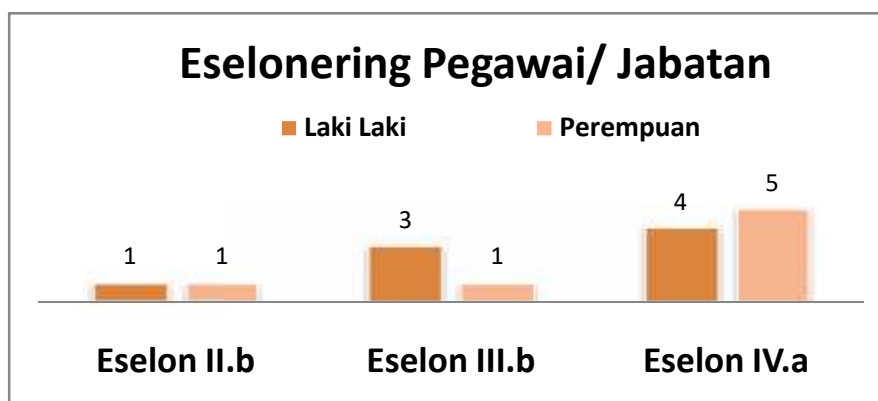
Tabel 1.3.
Data Pegawai Negeri Sipil BPBD Kabupaten Bone
Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Latihan Struktural
Tahun 2018

No.	Tingkat Golongan	Jumlah
1.	Diklat II	1
2.	Diklat III	1
3.	Diklat IV	9



Tabel 1.4
Data Pegawai BPBD Berdasarkan Eselon
Tahun 2018

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	II.a	-
2.	II.b	1
3.	III.a	-
4.	III.b	4
5.	IV.a	9



1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2018 adalah :

- Menganalisis daerah-daerah rawan bencana dalam rangka mengurangi resiko serta mengantisipasi korban akibat bencana;
- Mengkoordinir dalam penyelenggaraan penanganan korban bencana pada saat terjadinya bencana, bersama-sama dengan instansi terkait;
- Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap kerugian yang ditimbulkan pasca bencana.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone. Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah **“GEMAR SIGAB” (Gerakan Masyarakat Siaga Bencana)**.

Inovasi ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Inovasi ini dimulai dengan pemberian himbauan-himbauan kepada masyarakat untuk menstimulus kesadaran mereka terhadap kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana. Himbauan ini berupa tulisan dengan warna yang mencolok dan diletakkan di tempat-tempat umum, seperti kantor desa, sekolah dan puskesmas.

Sosialisasi dan simulasi (gladi) yang dilakukan oleh Tim Inovasi BPBD mengambil peran penting dalam program ini. Sosialisasi dan simulasi ini dilakukan oleh tenaga terlatih dari BPBD Kab. Bone. Kegiatan ini melibatkan perwakilan unsur potensi sumberdaya manusia penanggulangan bencana. Kegiatan ini dirancang seperti terjadi bencana banjir besar dan gempa bumi dengan cakupan paparan yang luas. Pelaksanaan ini diawali dengan pembekalan peserta untuk mengingatkan peran masing-masing dalam kejadian bencana yang sebenarnya dan langsung dilakukan gladi. Pada kegiatan gladi tersebut juga untuk menguji kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumberdayakebencanaan.

Pada kegiatan simulasi (gladi) ini juga disertai dengan penentuan jalur evakuasi sebagai titik berkumpul warga ketika terjadi bencana. Masyarakat dibekali dengan keterampilan mengevakuasi korban bencana secara cepat, seperti menggunakan sarung dan bambu untuk membawa korban ke tempat evakuasi sebagai pengganti tandu. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk membentuk posko dapur umum untuk memenuhi kebutuhan logistik korban bencana.

Pembinaan pengembangan inovasi dilakukan di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan melalui penyuluhan-penyuluhan. Penyuluhan tersebut bertujuan agar masyarakat mendapatkan berbagai informasi serta mampu berperan dalam membangun kehidupannya. Penyuluhan sosial merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana alam.

Penyuluhan sosial dilakukan agar setiap proses penanggulangan bencana memiliki dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang positif dan berkelanjutan, baik terhadap masyarakat yang terkena bencana maupun terhadap pihak terkait lainnya.

Fungsi penyuluhan sosial dalam upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif, penyuluhan sosial dilakukan untuk mulai menggerakkan masyarakat agar mampu waspada dan mengantisipasi bahaya bencana.
2. Sosialisasi, berfungsi untuk menyebarkan berbagai informasi awal mengenai rencana *tindak mitigasi* bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, *rehabilitasi*, maupun kegiatan *rekonstruksi*.
3. Preparasi, yaitu untuk menyiapkan masyarakat agar selalu siap dan tanggap untuk melaksanakan petunjuk-petunjuk yang telah ditetapkan oleh pemerintah di wilayah bencana.
4. Promosi, yaitu untuk mendukung pemerintah agar setiap upaya positif dalam *penyuluhan sosial* atas penanggulangan bencana berjalan aktif dan permanen.
5. Partisipasi, yaitu untuk meningkatkan dukungan dan keterlibatan berbagai *elemen* masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana alam.
6. Desiminasi, yaitu untuk menyebarluaskan program-program pemerintah melalui penyuluhan sosial sebagai upaya penanggulangan bencana alam.

Sebagai kelanjutan dari serangkaian kegiatan ini, maka BPBD Kab. Bone membentuk Tim Gemar Sigab di setiap Desa dan Kelurahan. Tim Gemar Sigab ini bertugas untuk membantu BPBD Kab.Bone untuk mengawasi desa yang didiaminya.Dalam tim ini, Kepala Desa dan Kepala Dusun menjadi penggerak utama. Anggota-anggota Tim Gemar Sigab belajar dan berlatih kegiatan yang harus perlu dilakukan dalam masa pra-bencana, masa tanggap darurat, dan masa pasca bencana. Tim ini akan dipimpin oleh orang yang disepakati masyarakat. Tugas ini tidak harus menjadi beban pemimpin formal (Ketua RT/ RW/ Kelurahan) namun bisa diambil dari anggota masyarakat yang disepakati. Tugas Tim Gemar Sigab ini antara lain:

1. Menyiapkan tanda bahaya yang disepakati dan mensosialisasikannya kepada seluruh masyarakat;
2. Menyiapkan tempat evakuasi dan melengkapinya dengan sarana dan prasarana yang diperlukan (tenda, genset dan lampu-lampu, bahan makanan kering, air minum dalam kemasan, peralatan masak dll);
3. Menginventarisasi potensi warga dalam hal keahlian misalnya dokter, perawat, instalasi listrik, tukang masak,;
4. Menginventarisir sarana yang diperlukan misalnya kendaraan, alat komunikasi, alat P3K.dll.

Tim ini memiliki struktur sendiri yang terdiri dari:

1. Koordinator Umum Tim
2. Seksi Siaga, bertugas untuk peringatan dini dan pemetaan.
3. Seksi Tanggap Darurat, bertugas untuk menyiapkan penyelamatan, pengungsian dan mengurus logistik.
4. Seksi Komunikasi, bertugas untuk mendokumentasikan dan menjalin informasi hubungan luar.
5. Seksi Kesejahteraan, bertugas untuk melakukan pertolongan pertama dan dapur umum.

Tim ini tetap berkoordinasi langsung dengan pihak BPBD Kab. Bone.

Adapun inovasi **DengSiba (Desa Siaga Bencana Peduli Difable)**. Dalam Upaya untuk mewujudkan Kabupaten/Kota layak anak, Badan Penanggulangan Desa Rama Anak di 5 Kecamatan yakni Kec. Dua Boccoe , Kec. T.Riattang Barat , Kec. Cina , Kec. Awangpone dan Kec. Libureng di implementasikan melalui kegiatan rintisan desa rama anak dengan pengembangan inovasi Deng Siba(Desa Siaga Bencana Peduli Difable).

Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan advokasi untuk menciptakan suatu lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak . selama ini program dan kegiatan termasuk pembangunan , anak-anak hanya dijadikan objek dan tidak semua haknya terpenuhi , termasuk untuk berkumpul dan berpendapat itu belum ada ruang untuk anak kedepan, ingin dalam pembangunan dipikirkan juga untuk kenyamanan anak.

Dengan memberlukkan kegiatan rintisan desa ramah anak khususnya di BPBD ada upaya penanganan terhadap korban khususnya anak baik sebelum saat dan setelah bencana yang menimpa anak itu lebih mahal di bandingkan dengan upaya pencegahan.

Pendekatan melalui system itulah yang akan dilakukan bersama dalam menciptakan suatu lingkungan yang terlindungi bagi anak dalam memenuhi hak-hak mereka .

Jumlah anak penyandang disabilitas dalam keterlibatan penyelenggaraan penanggulangan bencana laki-laki dan perempuan

Laki-laki : 3.304 orang

Perempuan : 3.078 orang

Tujuan dari inovasi Deng Siba ini yaitu memberikan peluang atau adanya keterlibatan difable dalam penanggulangan bencana. Manfaatnya yaitu meningkat ya kepedulian masyarakat terhadap difable dalam setiap program dan kegiatan.

Inovasi SiPen (Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah). Sekolah siaga bencana merupakan upaya membangun kesiapsiagaan sekolah terhadap bencana dalam rangka menggugah kesadaran seluruh unsur-unsur dalam bidang pendidikan baik individu maupun kolektif disekolah dan lingkungan sekolah baik itu sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Tujuan dari sekolah siaga bencana yaitu membangun budaya siaga dan budaya aman sekolah dengan mengembangkan jenjang sesama para berkepentingan di bidang penanganan bencana, meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu dalam mewujudkan tentang belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota komunitas sekolah serta komunitas di sekeliling sekolah, menyebarluaskan dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur pendidikan sekolah

Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah tahun 2017

Laki-laki : 100

Perempuan : 150

Jumlah anak sekolah yang sudah mendapatkan sosialisasi penanggulangan bencana di sekolah tahun 2018 di 20 Sekolah Kab. Bone yaitu 500 orang

Laki-laki : 441

Perempuan : 559

Tujuan dari inovasi SiPena ini yaitu Siswa atau siswi di sekolah mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana, saat bencana, dan setelah bencana
Meningkatkan upaya Sistem Informasi Penanggulangan Bencana.

Dokumentasi Inovasi

Gemar Sigab (Gerakan Masyarakat Siaga Bencana)



Deng Siba (Desa Siaga Bencana Peduli Difable)



Si Pena (Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah)





1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menginformasikan pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Agar mempermudah memahami Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone diperlukan suatu penyajian yang berurutan dan tersistem, untuk itu Tim Penyusun membuat sistematika penyajian yang sudah sesuai standar pelaporan sebagai berikut :

1. Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi aspek strategis serta struktur organisasi

2. Bab II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018

3. Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan Pencapaian kinerja Tahun 2018 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2018

4. Bab IV : PENUTUP

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone dan Saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Gambar 2.1

Komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013-2018 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2013-2018. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone 2013-2018 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus

dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Bone. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2013-2018 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Bone.

2.1.1. Visi dan Misi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Bone 2013-2018 adalah ***Masyarakat Bone yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera***. Visi ini dijabarkan dalam Misi Bupati yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, adil dan merata.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang berkeadilan berbasis nilai-nilai agama dan kearifan lokal untuk mewujudkan manusia mandiri.
3. Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan
5. Mengembangkan seni dan budaya dalam kemajemukan masyarakat.
6. **Menguatkan budaya politik dan hukum yang demokratis dan bebas KKN.**
 - Berkaitan dengan misi tersebut urusan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sangat erat kaitannya dengan misi ke 4 yaitu ” ***Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan***”.

2.1.1 VISI

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, tugas dan fungsinya yang tidak terpisahkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bone. Berdasarkan hal itu, maka pernyataan visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone adalah :

“Terselenggaranya Penanggulangan Bencana yang Tangguh, Cepat dan Tepat”

Visi tersebut memberi gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Kabupaten Bone, yaitu :

1. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud, jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat.
2. Mewujudkan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilandasi oleh kebersamaan, kemitraan, keberdayaan dan keterpaduan serta nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang diwarisi masyarakat Kabupaten Bone.

2.1.2 MISI

1. Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, cepat, tepat dan menyeluruh.
2. Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
3. Memenuhi hak masyarakat yang terkena bencana secara adil.

4. Meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana.

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

Misi 1: Menyelenggarakan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, cepat, tepat dan menyeluruh.

Tujuan : Terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh

Misi 2 : Meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Tujuan: Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Misi 3 : Memenuhi hak masyarakat yang terkena bencana secara adil

Tujuan : Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena bencana (Pendirian tenda pengungsi, bantuan logistik dan bantuan dana);

Misi 4 : Meningkatkan kerjasama antara lembaga dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana

Tujuan : Meningkatnya kerjasama antara lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

Indikator kinerja dan target kinerja untuk masing-masing tujuan strategis diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator, Kondisi Awal dan Target Akhir Renstra BPBD

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh	Jumlah Media Penyabrluasan Informasi	Media	3	3
Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatnya Peran serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Orang	-	100

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Korban Bencana	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	74	100
	Presentase Korban Bencana yang Tertangani pada saat Tanggap Darurat	%	100	100
Meningkatnya kerjasama antara lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Presentase Identifikasi terhadap Jumlah Kejadian Bencana	%	100	100

2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Terlaksananya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh
Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana

Tujuan 2 Memberdayakan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
Sasaran : Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

Tujuan 3 Terpenuhinya hak masyarakat yang terkena bencana (Pendirian tenda pengungsi, bantuan logistik dan bantuan dana)
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Korban Bencana

Tujuan 4 Meningkatkan kerjasama antara lembaga yang terkait dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
Sasaran : Terlaksananya Identitas Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Media Penyabrluasan Informasi	Media	3	5
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana yang Terlatih	Orang	100	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Korban Bencana	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	74	100
	Presentase Korban Bencana yang Tertangani pada saat Tanggap Darurat	%	100	100
Terlaksananya Identitas Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana	Presentase Identifikasi terhadap Jumlah Kejadian Bencana	%	100	100

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2018

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap Korban Bencana	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
Terlaksananya Identitas Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana
	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2018 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2018, IKU dan APBD. Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menetapkan PK sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Media Penyebarluasan Informasi	Media	3
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Relawan Penanggulangan Bencana yang Terlatih	Orang	100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan	%	100

Terhadap Korban Bencana	Sosial Selama Masa Tanggap Darurat		
	Presentase Korban Bencana yang Tertangani pada saat Tanggap Darurat	%	100
Terlaksananya Identitas Kerugian dan Kerusakan Akibat Bencana	Presentase Identifikasi terhadap Jumlah Kejadian Bencana	%	100

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah dilakukan revisi pada tahun 2018 dan telah ditetapkan dengan Perbup Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Tanggal 13 November 2018 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5 IKU Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan}} \times 100\%$	Data pemantauan daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	$\frac{\text{Jumlah Korban yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah Korban bencana}} \times 100\%$	Rekap data kejadian bencana dan rekap data BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam masa pasca bencana}}{\text{Jumlah bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi}} \times 100\%$	Rekap data Identifikasi dan verifikasi kerusakan akibat bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2018
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	%	41
	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	%	82
	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	%	100
Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	%	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP		B

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 5.360.437.928** yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Rencana Belanja Badan Penanggulang an Bencana Daerah TA 2018

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.510.437.928	28%
2	Belanja Langsung	Rp. 3.850.000.000	72%
Jumlah		Rp. 5.360.437.928	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Alokasi per Sasaran Tahun Anggaran 2018

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	PERSEN TASE ANGGARAN
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Pelayanan Administrasi Perkantoran		1.065.539.000	99,69%
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	34.492.380	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	341.685.000	
			Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang undangan	26.100.000	
			Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	502.785.000	
			Pelaksanaan Administrasi Keuangan	160.476.620	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		582.469.500	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	400.100.000	
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	13.100.000	
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	48.800.000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	38.926.500	
			Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	66.528.000	
			Pemeliharaan Rutin/berkala	14.915.000	

		Peralatan Gedung Kantor		
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	38.885.000	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	27.385.000	
		Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	11.500.000	
		Pengembangan Data/Informasi	193.175.000	
		Penyusunan Dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	50.375.000	
		Sosialisasi/Lokakarya Lingkungan Masyarakat	72.900.000	
		Rinitisan Desa Ramah Anak	69.900.000	
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	238.025.000	
		Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui brosur, leaflet, dan lain-lain	238.025.000	
		Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	96.050.000	
		Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	96.050.000	
		Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	133.050.000	
		Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	45.625.000	
		Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	87.425.000	

99,91%

			(PENA)		
Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana		342.435.000	89,59%	
		Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	135.525.000		
		Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	101.250.000		
		Penyiapan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	105.660.000		
Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP					
Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		719.021.500	60,36%	
		Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	212.500.000		
		Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	506.521.500		
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana		441.350.000		
		Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian akibat Bencana	120.025.000		
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	208.800.000		
		Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	112.525.000		
JUMLAH			3.850.000.000		

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar **Rp. 3.850.000.000** dengan presentase terbesar anggaran untuk mendukung sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana dengan besaran 99,69%. Sasaran lain dengan anggaran yang relatif besar adalah sasaran Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana yaitu sebesar 99,91%, sasaran Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial

Selama Masa Tanggap Darurat dan Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP sebesar 89,59% . Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relatif kecil adalah sasaran Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana sebesar 60,36% dari total anggaran belanja langsung.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Ordinal

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % 100%	Baik
3	66 % 75 %	Cukup
4	51 % 65 %	Kurang
5	50%	Sangat Kurang

Secara umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai sasaran dan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2013–2018. Dalam Renstra terdapat 2 sasaran dengan 4 indikator sasaran. Sasaran 1 terdapat 3 indikator kinerja, Sasaran 2 terdapat 1 indikator kinerja.

Tabel 3.2
Pencapaian Indikator Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Pencapaian Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	3	BS = B =2 SK =1 C = K =
2.	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	1	BS = B = 1 SK = C = K =
	JUMLAH		BS = B = 3 SK = 1 C = K =

1.1.1 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 2018

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	100%	11%	11%
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	78%	78%
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%

Dari 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja utama sasaran dapat dijelaskan pencapaian indikator sasaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Tabel 3.3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase (%)
Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	2	100% dan 78%
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang	1	11%
	Jumlah		
Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana			
1.	Baik Sekali		
2.	Baik	1	100%
3.	Cukup		
4.	Kurang		
5.	Sangat Kurang		

Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 2 sasaran dengan 4 indikator kinerja, diketahui bahwa 3 indikator sasaran atau 100% Baik, dan 1 indikator sasaran atau 11% sangat kurang

1.1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone tahun 2018 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018 dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dijelaskan melalui uraian tiap sasaran berikut di bawah ini:

A. Sasaran 1: Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

a. Perbandingan *Antara Target dan Realisasi Sasaran 1*

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana

No.	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	100%	11%	11%

b.	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	100%	87%	87%
c.	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana, dengan capaian **11 % kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 11% , dari target 100% dengan persentase 11% Capaian ini dikategorikan **Sangat Kurang**.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 2 yaitu Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat, dengan capaian **78% kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 78%, dari target 100% dengan persentase 78% Capaian ini dikategorikan **Baik**

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 3 yaitu Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP, dengan capaian **100% telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100% dari target 100% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan **Baik**.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 1

Tabel 4. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1.

No	Indikator Kinerja	Capaian			
		2015	2016	2017	2018
a.	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	11%	11%	11%	11%
b.	Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	92%	92%	89%	87%
c.	Presentase Masyarakat Korban Bencana	100%	100%	100%	100%

	yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP				
--	--	--	--	--	--

Realisasi pada tahun 2018 Mencapai 87% dari target sebelumnya, mengalami penurunan, dari tahun 2017 tahun sebelumnya sebesar 89% hal ini disebabkan krn jumlah kejadian dari tahun sebelumnya berkurang.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dikatakan bahwa bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Kabupaten Bone adalah Kabupaten terbesar ketiga di Sulawesi Selatan terdiri dari 27 Kecamatan dengan luas wilayah 4,459 Km², Kecamatan Bontocani merupakan kecamatan terbesar di Kabupaten Bone dengan Luas Wilayah 465,35Km², dan Kecamatan Tanete Riattang merupakan Kecamatan terkecil di Kabupaten Bone dengan Luas Wilayah 23,79Km², Curah Hujan tertinggi di Kabupaten Bone terjadi pada Mei 2017 dengan curah 589 mm³ Rata-rata lama Penyinaran matahari tertinggi di Kabupaten Bone terjadi pada bulan Oktober 2017 dengan suhu udara tahun 2017 berkisar 25,1⁰C – 27,6⁰C.

Kondisi lingkungan yang terus mengalami tekanan sebagai akibat kejadian bencana alam yang terjadi setiap tahun, menyebabkan lingkungan sebagai sumber utama kehidupan.

2. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat

Berdasarkan Tabel 3 capaian indikator kinerja sasaran 1 dengan indikator Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana adalah sebanyak 27 kecamatan yang harus memiliki peta rawan bencana. Dari jumlah kecamatan yang memiliki peta rawan bencana hanya 3 kecamatan yang memiliki peta rawan bencana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mencapai 11% atau 90% dari target yang telah ditentukan. Berdasarkan dari kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2017 adalah kebakaran 52 kejadian, longsor 1 kejadian, banjir 8 kejadian, dan angin puting beliung sebanyak 10 kejadian sedangkan kejadian yg terjadi tahun 2018 yakni Kebakaran 90 kejadian, Puting Beliung 22 Kejadian, Banjir 18 Kejadian dan Longsor 9 Kejadian.

3. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP

Dari data hasil rekapan bidang kedaruratan dan logistic pencapaian presentase masyarakat korban bencana yang tertangani tepat waktu sesuai SOP menunjukkan pencapaian kinerja yang sama dari tahun ketahun yakni 100% .

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 2 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 2 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak **98%** dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran Meningkatkan penanganan pemulihan pasca bencana, dengan pencapaian kinerja sebanyak 100%, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 58%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	11%	99,66 %	0,4%
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	78%	99%	1%
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	100%	83%	17%

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi	238.025.000	237.867.630	99%
		- Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui brosur, leaflet dan lain-lain	238.025.000	237.867.630	99%
		Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	96.050.000	96.050.000	100%
		- Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana	96.050.000	96.050.000	100%
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	133.050.000	132.790.000	99%
		- Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	45.625.000	45.375.000	98%
		- Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah	87.425.000	87.415.000	99%
		- Workshop/Pameran Pengurangan Resiko Bencana	-	-	-
2.	- Presentase Korban	Program Kedaruratan	342.435.000	306.821.400	89%

	Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Logistik Penanggulangan Bencana			
	- Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangan i Tepat Waktu sesuai SOP	- Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	135.525.000	134.525.000	99%
		- Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	101.250.000	101.250.000	100%
		- Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	105.660.000	70.046.400	66%

- Program dari sasaran ini adalah Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi, Peningkatan Peran Serta Kapasitas dalam Penanggulangan Bencana, Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana dan Program Kedaruratan Logistik Penanggulangan Bencana. Tujuan dari program ini adalah Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yaitu Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana dengan capaian sebesar 11%, Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat dengan capaian 87% dan Persentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangan i Tepat Waktu sesuai SOP 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program-program ini adalah sebesar Rp. 809.560.000 realisasi sebesar Rp. 773.529.039,- atau 91% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui brosur, leaflet dan lain-lain sebanyak 3 Media, Penyuluhan dan Pelatihan Relawan Penanggulangan Bencana terdiri 100 Orang, Pemberdayaan Posko Siaga Bencana sebanyak 42 orang posko, Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah di 30 Sekolah, Workshop/Pameran Pengurangan Resiko Bencana dengan 1 Kegiatan, Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana yaitu di 27 Kecamatan, Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana terdiri dari 7 jenis Kebutuhan Dasar yakni mie instant, air mineral gelas, gula pasir, minyak goreng, ikan kaleng, sarung dan terpal, Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana terdapat 2 Paket yaitu Paket Logistik dan Peralatan Bencana.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Walaupun capaian pada sasaran 1 ini sudah optimal namun masih tetap ada permasalahan di lapangan antara lain belum memadainya sarana, prasarana dan sumber daya aparatur pendukung penanganan korban bencana. Pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan terkait belum siap dalam menghadapi bencana sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa maupun kerugian material yang ditimbulkan bencana solusi nya adanya dukungan pemerintah pusat terhadap penanggulangan bencana cukup besar. Permasalahan yang lain terkait sasaran ini Penanganan bantuan terhadap korban bencana pada masa darurat bencana belum sesuai harapan baik soal kebutuhan maupun jumlah bantuan terutama kepada kelompok rentan solusi dari permasalahan ini adanya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipun dalam jumlah yang terbatas.

B. Sasaran 2: Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana.

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi pada Sasaran

Tabel 9

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi Daerah Korban Pasca Bencana

No	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian Kinerja
a.	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu 100% dengan capaian 100% **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100%, dari target 100% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik.

b. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 10. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2.

No	Indikator Kinerja	Capaian		
		2016	2017	2018
a.	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	100%	100%

Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100% dari target 100%, mengalami Peningkatan dari tahun 2016 dan tahun 2017.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

1. Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu 100% dengan capaian 100% **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100%, dari target 100% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik.

d. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 1 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 1 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran meningkatnya pemulihan penanggulangan pasca bencana, telah mencapai kinerja sebanyak 100% namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 72% dari total anggaran yang dialokasikan. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.56 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan Pemulihan Pasca Bencana	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%	60%	40%

e. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Tabel.3.7 Program dan Kegiatan

No	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
1.	Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	719.021.500	367.021.000	51%
		- Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	212.500.000	-	0%
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	506.521.500	367.021.500	72%
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	441.350.000	307.546.000	69%
		- Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	120.025.000	118.066.000	98%
		- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	208.800.000	76.961.000	36%
		- Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	112.525.000	112.519.000	99%

Program dari sasaran ini adalah Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pada Tahapan Pasca Bencana. Program ini bertujuan Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini yaitu Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana dengan capaian sebesar 100%.

Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 1.160.371.500 realisasi sebesar Rp. 674.567.000,- atau 58% dengan kegiatan-kegiatan yang

dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan, Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan, Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana di 27 Kecamatan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan sebanyak 1 Laporan, Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi yakni 1 Dokumen.

f. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi kejadian bencana sehingga upaya pemulihan pasca bencana juga belum optimal. Data tentang jumlah korban meninggal dan mereka yang luka-luka serta jumlah rumah yang hancur total, rusak berat dan rusak ringan kerap kali ada beberapa versi yang saling berbeda satu sama lain. Perbedaan data dalam hal rumah, fasilitas dan infrastruktur publik yang rusak akan menghambat perhitungan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang selanjutnya akan memperlambat pemulihan seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

1.2 PENCAPAIAN IKU

Dari sasaran Meningkatkan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana terdapat 3 indikator, pada indikator kinerja utama 1 yaitu Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana, dengan capaian **11 % kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 11% , dari target 100% dengan persentase 11% Capaian ini dikategorikan Sangat Kurang. Pada indikator kinerja utama 2 yaitu Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat, dengan capaian 78% **kurang dari target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 78%, dari target 100% dengan persentase 78% Capaian ini dikategorikan Baik, dan pada indikator kinerja utama 3 yaitu Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP, dengan capaian 100% **telah mencapai target** yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100% dari target 100% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik.

Sasaran Meningkatkan penanganan pemulihan pasca bencana terdapat 1 indikator yaitu Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana . Realisasi pada tahun 2018 mencapai 100%, dari target 100% dengan persentase 100%. Capaian ini dikategorikan Baik.

1.3 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.360.437.928,- (88,19%)

1.	Anggaran Kinerja :		
	- Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.510.437.928,- (93,44%)
	- Belanja Langsung	Rp.	3.850.000.000,- (86,13%)
	Jumlah	Rp.	5.360.437.928,- (88,19%)

2. Pemanfaatan Anggaran

- a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.510.437.928,- (93,44%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp.	1.375.063.600,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp	135.374.328,-
Insentif Pungutan Retribusi daerah	Rp	0,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.850.000.000,- (86,13%) dengan jumlah 10 program dan 29 kegiatan.

3. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2018 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Belum adanya dukungan sumberdaya yang memadai, jumlah anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana.
2. Penanganan bantuan terhadap korban bencana pada masa darurat bencana belum sesuai harapan baik soal kebutuhan maupun jumlah bantuan terutama kepada kelompok yang rentan.
3. Penanggulangan bencana masih bersifat sektoral, belum dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Belum terbangunnya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam sistem penanggulangan bencana
5. Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana membutuhkan anggaran yang cukup besar

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Pengadaan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Dukungan Pemerintah Pusat terhadap penanggulangan bencana cukup besar
3. Adanya bantuan peralatan dan logistik dari pemerintah pusat, sekalipun dalam jumlah yang terbatas
4. Adanya regulasi yang mengatur bahwa kebijakan penanggulangan bencana harus selaras dengan kebijakan pembangunan nasional
5. Adanya Regulasi yang mengatur bahwa pengurangan resiko bencana merupakan tanggungjawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan masyarakat dan dunia usaha
6. Regulasi tentang pemulihan daerah pasca bencana telah diatur dalam peraturan pemerintahan.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2018, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone pada tahun 2018 adalah baik, karena terdapat 3 indikator memenuhi kriteria tinggi dan ada 1 indikator yang kurang memenuhi kriteria.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2018, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone ke depan. Bagi instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Bone untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.

LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. A. SURYA DARMA, SE. M.Si
Jabatan : Plt. KEPALA BPBD

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : DR. H.A. FAHSAR M.PADJALANGI, M.Si
Jabatan : Bupati Bone

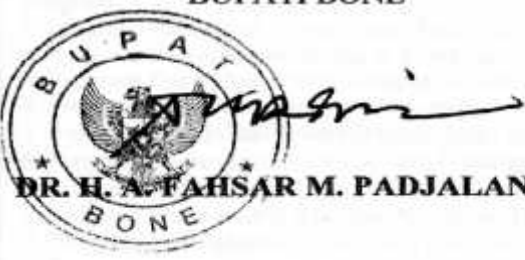

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Watampone, Desember 2018

<p>Pihak Kedua,</p> <p>BUPATI BONE</p>  <p>DR. H. A. FAHSAR M. PADJALANGI, M. Si</p>	<p>Pihak Pertama,</p>  <p>PLT. KEPALA PTI AKSANA BPBD KABUPATEN BONE</p> <p>H. A. SURYA DARMA, S.E, M. Si Pangkat : Pembina Utama Madya NIP. 19600124 198702 1 001</p>
---	--



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BONE

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Penanggulangan Bencana	1. Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	B
2	Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana	1. Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana 2. Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat 3. Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	26% 78% 100%
3	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	1. Persentase Rehabilitasi/Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	100%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 1.065.539.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp 582.469.500
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp 38.885.000
4. Program Pengembangan Data / Informasi	Rp 193.175.000
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp 719.021.500
6. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rp 342.435.000
7. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	Rp 441.350.000
8. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Rp 238.025.000
9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	Rp 96.050.000
10. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Rp 133.050.000

Watampone, Desember 2018


DR. H. A. FANBAR M. PADJALANGI, M. Si


**Plt. KEPALA PELAKSANA
BPBD KABUPATEN BONE**
H. A. SURYA DARMA, S.E, M. Si
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 HP. 19600124 198702 1 001

REALISASI ANGGARAN SKPD TAHUN 2018

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BONE

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	PERMASALAHAN	SOLUSI	KET
1	Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 34.492.380	Rp. 33.545.293	97%			
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp. 341.685.000	Rp. 332.215.000	97%			
		- Penyediaan Jasa Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Rp. 26.100.000	Rp. 26.070.000	100%			
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Salam Daerah dan Luar Daerah	Rp. 502.785.000	Rp. 502.621.500	100%			
		- Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Rp. 160.476.620	Rp. 159.621.675	99%			
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Rp. 400.100.000	Rp. 400.100.000	100%			
		-Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Rp. 13.100.000	Rp. 13.100.000	100%			
		- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 48.800.000	Rp. 48.800.000	100%			
		- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Rp. 38.926.500	Rp. 38.926.500	100%			
		- Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional	Rp. 66.628.000	Rp. 66.101.590	99%			
		- Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp. 14.915.000	Rp. 14.911.500	100%			

3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 27.385.000	Rp. 27.375.000	100%			
		- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Rp. 11.500.000	Rp. 11.489.800	100%			
		- Penyusunan dan Analisis Data Informasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp. 50.375.000	Rp. 50.375.000	100%			
4	Pengembangan Data Informasi	- Sosialisasi/Lokakarya Lingkungan Masyarakat	Rp. 72.900.000	Rp. 72.900.000	100%			
		- Rintisan Desa Ramah Anak	Rp. 69.900.000	Rp. 69.900.000	100%			
5	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	Rp. 212.500.000	-	0%	Minimnya Pagu dalam kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jembatan tidak terealisasi disebabkan karena pagu biaya konstruksi fisik Dana Siap Pakai (DSP) transisi Darurat ke Pemulihan yang dari BNPB RI belum masuk ke Rekening BPBD Kab. Bone sebagai dana pendamping tidak diajukan sampai akhir tahun 2018	Pagu dalam kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan tetap dimasukkan dalam penganggaran tahun 2019 sambil menunggu Dana Konstruksi Fisik Dana Siap Pakai (DSP) dari RI masuk ke rekening BPBD Kab. Bone	
		- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	Rp. 506.521.500	Rp. 367.021.500	72%	Pagu dalam Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tidak teralisasi disebabkan karena apagu biaya konstruksi fisik (Talud/Bronjong) Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB RI belum masuk ke rekening BPBD Kab. Bone sehingga biaya perencanaan dan pengawasan dari APBD Kab. Bone sebagai Dana Pendamping tidak digunakan sampai akhir tahun anggaran 2018	Pagu dalam kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tetap dimasukkan dalam penganggaran Tahun 2019 sambil menunggu Dana Konstruksi Fisik Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB RI masuk ke rekening BPBD Kab. Bone	

6	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	- Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	Rp	135.525.000	Rp	135.525.000	100%	-	-
		- Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	Rp	101.250.000	Rp	101.250.000	100%	-	-
		-Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	Rp	105.660.000	Rp	70.046.400	64%	Pengadaan peralatan berupa mobil tangki air yang dijanjikan BNPB untuk BPBD Kab. Bone tahun 2018 dengan persyaratan menyiapkan belanja paket/pengiriman, tetapi peralatan tersebut tidak teralisasi hingga akhir tahun 2018	Dana belanja paket/pengiriman dianggarkan (dialihkan) ke tahun anggaran 2019 dengan kegiatan yang sama
	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana	- Indentifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana	Rp	120.025.000	Rp	118.066.000	98%	Dengan tidak terealisasinya pengadaan peralatan itu, sehingga pencapaian realisasi anggran tidak mencapai 100%	Pagu Belanja Penggandaan pada kegiatan identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana tetap diajukan dalam pelaksanaan kegiatan mengikuti penambahan anggaran yang diajukan untuk tahun 2019
		- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Rp	208.800.000	Rp	76.961.612	37%	Pagu belanja penggandaan pada kegiatan identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian akibat bencana tidak terealisasi sebanyak 2% untuk persiapan penggandaan kegiatan perencanaan dan pengawasan Dan pendamping yang tidak terealisasi karena Dana Fisik Konstruksi dari BNPB RI belum msuk ke rekening BPBD Kab. Bone hingga akhir Tahun 2018	
		- Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rp	112.525.000	Rp	112.519.000	100%	Dana monitoring, evaluasi da pelaporan hanya sebagian yang digunakan untuk memonitoring konstruksi fisik kegiatan (Bronjong) di Kec. Cina dan Kec. Lappariaja dari dana APBD Kab. Bone dan sebahagian tidak terealisasi disebabkan karena pekerjaan fisik konstruksi penanganan transisi darurat ke pemulihan (Jembatan,Bronjong dan Talud) dari Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB RI dananya belum masuk ke rekening BPBD Kab. Bone sampai akhir tahun 2018	Pagu kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan tetap dimasukkan dalam anggaran 2019 untuk digunakan dalam monitoring dan evaluasi perencanaan, pengawasan dan konstruksi fisik pelaksanaan penangangan transisi darurat ke pemulihan

8	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	- Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui Brosur, Lefleat dll	Rp	238.025.000	Rp	237.867.630	100%	Masih kurangnya media informasi kesiapsiagaan bencana mengingat luas dan jumlah kecamatan di kabupaten bone sebanyak 27 kecamatan	Menambah jumlah media informasi untuk disebarakan kekalangan kecamatan
9	Peningkatan Peran Serta dan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	- Penyuluhan dan Pelatihan relawan Penanggulangan Bencana	Rp	96.050.000	Rp	96.050.000	100%	Belum adanya peta kerawanan bencana	Membuat peta kerawanan bencana yang terbaru dengan berkordinasi dengan BNPB, BMKG dan pihak terkait
10	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	- Pemberdayaan Posko Siaga Bencana						Kurangnya waktu pelaksanaan pelatihan relawan penanggulangan bencana dan kurangnya praktek pelatihan	Menambah waktu pelaksanaan dan mengadakan atau menambah jumlah peralatan kebencanaan berupa alat dan perlengkapan evakuasi bencana
		- Sosialisasi Penanggulangan Bencana Di Sekolah	Rp	87.425.000	Rp	87.415.000	100%	Masih kurangnya jumlah sekolah untuk pelaksanaan penanggulangan bencana karna terbatasnya jumlah anggaran	Menambah anggaran kegiatan sipena mengingat luas kabupaten Bone dan jumlah sekolah yang tersebar di beberapa wilayah kabupaten Bone sangat banyak
		- Workshop/Pameran Pengurangan Resiko Bencana							

INDIKATOR UTAMA TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN CAPAIAN TARGET KINERJA	SUMBER	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana	Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana	$\frac{\text{Jumlah Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana}}{\text{Jumlah Seluruh Kecamatan}} \times 100\%$	Data pemantauan daerah rawan bencana	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	$\frac{\text{Jumlah Korban yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah Korban bencana}} \times 100\%$	Rekap data kejadian bencana dan rekap data BPBD	Bidang Kedaruratan dan Logistik
		Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat}}{\text{jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat}} \times 100\%$		
2	Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana	$\frac{\text{Jumlah bencana yang dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam masa pasca bencana}}{\text{Jumlah bencana yang harus dilakukan rehabilitasi dan rekonstruksi}} \times 100\%$	Rekap data Identifikasi dan verifikasi kerusakan akibat bencana	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi



RI, KEPALA BPBD KAB. BONE

H. A. SURYA DARMA, SE. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19600424 198702 1 004

CASCADING 2019

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)				Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya				
TUJUAN								
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Kebencanaan				Meningkatkan Responsibilitas Penanganan dan penanggulangan Bencana				
SASARAN								
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Kebencanaan				Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Penanggulangan Bencana		Meningkatnya penanganan pemulihan pasca bencana		
INDIKATOR								
Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP				Presentase Kecamatan yang memiliki peta rawan bencana		Presentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	Presentase Masyarakat Korban Bencana yang Tertangani Tepat Waktu sesuai SOP	Persentase Rehabilitasi dan Rekonstruksi daerah korban pasca bencana
PROGRAM								
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penunjang Pemerintahan Umum	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Penanggulangan Bencana	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Tahapan Pasca Bencana
KEGIATAN								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Penyebarluasan Informasi Penanggulangan Bencana melalui Brosur, Leaflet, dan lain-lain	Pemberdayaan Posko Siaga Bencana	Peninjauan dan Penanganan Korban di Lokasi Bencana	Identifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Akibat Bencana
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengadaan Mebeleur	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor			Pencegahan dan Pengurangan Risiko Bencana		Penyaluran Bantuan Kebutuhan Dasar terhadap Korban Bencana	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor			Sosialisasi Penanggulangan Bencana di Sekolah		Penyiapan Kebutuhan Dasar Terhadap Korban Bencana	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Terdampak Bencana
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran								
PENANGGUNG JAWAB								
SEKRETARIAT				BIDANG KESIAPSIAGAAN DAN PENCEGAHAN		BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK		BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI